

SK IJIN PENDIRIAN SEKOLAH DAN SK IJIN OPERASIONAL SEKOLAH SMK DWI BHAKTI CILEDUG

KANTOR WILAYAH DILAKUKAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI JAWA BARAT
DIDANG PENDIDIKAN MENENGAH KEJURUAN
Jalan Gedungmane Laut Rte. Mirkadinatu No. 209 Tilpon 72386 Bandung.

Nomor : 006.1/102.6/N.02.

Bandung, 14 April 1987.

SURAT PEMERINTAHAN TERDAFTAR

MENINGAT : 1. Surat permohonan dari Yayasan Pendidikan Dwi Bhakti Ciledug, t.d.

nomor: 0.1/1100/U/2.1/1981
tentang permohonan Pendirian dan penyelenggaraan sekolah,

begerta keterangan-keterangan dan laporan-laporan tentang usul pendirian dan penyelenggaraan sekolah,

2. Surat Pernyataan Kosonggupsi yang telah ditandai tangan oleh Dwi Bhakti Ciledug, t.d. sebagai penanggung jawab penyelenggaraan sekolah,

MENGINGAT : 1. Keputusan Menteri P dan K Republik Indonesia Nomor 091/0/1975 tentang Pelaksanaan Keputusan Menteri P dan K Nomor 079/0 Tahun 1975.

2. Keputusan Kepala Pemerintahan Dpt. P dan K Propinsi Jawa - Barat Nomor 014/Rpt/1975 tentang Pengelolaan Sekolah,

3. Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Menengah Kejuruan di Lingkungan Bidang Pendidikan Menengah Kejuruan Kantor Wilayah Departemen P dan K Propinsi Jawa Barat tahun 1976.

M E N T A P K A N :

BAWAH

1. Nama Sekolah
Alamat
Jurusan

QTPD Dwi Bhakti
Ciledug, Kabupaten Cirebon
Kecamatan Cirebon
Jl. Raya Cirebon KM 64 No.

Yang disebutkan diatas adalah Yayasan Pendidikan Dwi Bhakti Ciledug, Kabupaten Cirebon, telah terdaftar sebagai Sekolah Swasta di Bidang Pendidikan Menengah Kejuruan Kantor Wilayah Departemen P dan K Propinsi Jawa - Barat.

2. Surat Pernyataan berdasarkan ini mulai berlaku sejak dibuat, dengan ketentuan apabila yang berjungkutan tidak memenuhi syarat-syarat Pernyataan Kosonggupsi, maka kepala sekolah tersebut dapat diambil tindakan supaya menghentikannya agar tidak lagi bertukar keadaan yang berhubungan dengan penyelenggaraan sekolah.
3. Surat Pernyataan ini akan dianggapkan dengan peraturan-peraturan baru jika ternyata terdapat perbedaan-perbedaan.
4. Setiap awal tahunajaran sekolah tersebut diuruskan melalui dewan dewan ulung (Menginstrasi).

An. KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN P DAN K
PROVINSI JAWA BARAT

Kepala Bidang Pendidikan Menengah Kejuruan,

Drs. Komad Nawawi
NIP. 130074721.

Sury,

TEMBUSAN : Kepada Yth.

1. Kepala Kanwil Dpt. P dan K Propinsi Jawa Barat
2. Kepala Bagian Perencanaan,
3. Kepala Kedep P dan K Propinsi/Kabupaten Cirebon



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
DINAS PENDIDIKAN
Jl. Sunan Drajat No. 10 Telp. (0231) 321266
SUMBER 45611

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIREBON
Nomor : 421.A/Kpts. 2947 / Disdik

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN
KOMPETENSI KEAHLIAN TEKNIK KENDARAAN RINGAN
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN DWI BHAKTI
KECAMATAN CILEDUG KABUPATEN CIREBON

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIREBON

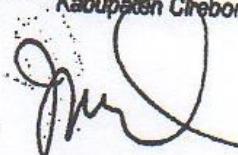
- Menimbang** :
1. bahwa pelaksanaan pendidikan merupakan tanggung jawab keluarga, masyarakat, dan pemerintah;
 2. bahwa dalam rangka membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam upaya pemerataan pendidikan, Kepala SMK Dwi Bhakti Ciledug mengajukan permohonan Izin Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan Dwi Bhakti Ciledug Kompetensi Keahlian Teknik Kendaraan Ringan Nomor 422 / 052 / SMK.DB.Cld.IX/2012.September.2012;
 3. bahwa dengan telah dipenuhinya persyaratan permohonan Izin Pendirian SMK Dwi Bhakti Ciledug Kompetensi Keahlian Teknik Kendaraan Ringan dipandang perlu untuk segera menetapkan keputusan Izin Pendirian SMK Dwi Bhakti Ciledug Kompetensi Keahlian Teknik Kendaraan Ringan dalam suatu Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor: 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pembentukan Dinas Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 32 Seri D.13);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 18 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2004 Nomor 33 Seri D.14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 18 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja dinas Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2006 Nomor 4 Seri D);
 7. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 46 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2008 Nomor 46, Seri D.4).

- Memperhatikan :**
1. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 Tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
 2. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 420/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;
 3. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon Nomor 420/Kpts. 673/Disdik 2011 Tanggal 04 Maret 2011 tentang Pembentukan Tim Pengkaji Pendirian dan Penutupan TK, SD, SMP, dan SMA/SMK Tingkat Kabupaten Cirebon;
 4. Surat Perintah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon Nomor 094 / 2839 / Dikmen Tanggal 14 September 2012 untuk melaksanakan Uji Kelayakan di SMK Dwi Bhakti Ciledug Tanggal 20 September 2012 serta dengan selesa;
 5. Proposal Kepala sekolah Menegah Kejuruan Dwi Bhakti Ciledug tentang Permohonan Izin Pendirian SMK Dwi Bhakti Ciledug Kompetensi Keahlian Teknik Kendaraan Ringan Nomor 422 / 052 / SMK.DB.Cld / IX / 2012 September 2012.

- Menetapkan**
- Pertama** : Memberikan Izin Pendirian Kompetensi Keahlian Teknik Kendaraan Ringan Sekolah Menengah Kejuruan Dwi Bhakti Kecamatan Ciledug Kabupaten Cirebon;
- Kedua** : Dalam melaksanakan tugas-tugasnya Kepala SMK Dwi Bhakti Ciledug diwajibkan mematuhi semua ketentuan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- Ketiga** : Menugaskan Kepala Bidang Pendidikan Menegah Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon untuk mengadakan pengawasan, bimbingan, pembinaan demi kelancaran kegiatan pembelajaran SMK Dwi Bhakti Ciledug Kompetensi Keahlian Teknik Kendaraan Ringan.
- Keempat** : Hal-hal lain yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri.
- Kelima** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sumber
Pada tanggal : 24 September 2012

Plt. Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Cirebon



DEDI NURUL S.A.
Pembina Utama Muda
NIP. 19590721 198303 1 009

Tembusan :

1. Yth. Bapak Bupati Cirebon;
2. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Kepala BAPPEDA Kabupaten Cirebon;
4. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
5. Yth. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Cirebon;
6. Yth. Camat Ciledug;
7. Yth. Kepala UPT Pendidikan Kecamatan Ciledug.